



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Bismillahirrohmanirrahim.

Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha esa, atas segala limpahan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya sehingga Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dapat disampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Temanggung, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah menyampaikan Ringkasan LPPD kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Ringkasan LPPD ini sebagai bentuk pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat yang mencakup gambaran dan penjelasan atas seluruh rangkaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Temanggung dalam kurun waktu Tahun 2025 baik

keberhasilan maupun kekurangannya, sehingga masyarakat dapat memberikan tanggapan atau saran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selanjutnya berguna sebagai bahan perbaikan program kerja dan peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah.

Berikut kami sampaikan Ringkasan LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025.

1. Capaian Kinerja Makro

Untuk mengukur capaian kinerja makro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terdapat 6 (enam) indikator, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran (TPT), Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Per Kapita, dan Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio). Capaian kinerja makro Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Capaian Kinerja Makro Kabupaten Temanggung Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025	Perubahan (%)
1	2	3	4	$= (4-3)/3 * 100$
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,86	72,52	0,92
2	Angka Kemiskinan	8,67	7,78	-10,27
3	Angka Pengangguran	2,35	2,31	-1,70
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,04	5,66	12,30
5	Pendapatan Perkapita	35.490.000	38.000.000	7,07
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,383	0,356	-7,05

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa capaian kinerja makro Tahun 2025 mengalami perubahan positif. Capaian IPM mengalami peningkatan yaitu 0,92 persen jika dibandingkan dengan Tahun 2024, Angka Kemiskinan yaitu 7,78

persen mengalami perubahan positif dengan perubahan 10,27 persen dibandingkan capaian Tahun 2024 yaitu 8,67 persen lebih baik jika dibandingkan capaian provinsi 9,48 dan capaian Nasional 8,47. Untuk capaian indikator Pertumbuhan Ekonomi yaitu 5,66 persen lebih baik dibanding Tahun 2024 yaitu 5,04 persen dengan pertumbuhan sebesar 12,30 persen dibanding dengan capaian Tahun 2024 begitu juga dengan Pendapatan Per Kapita dengan capaian Rp38.000.000,00 lebih besar jika dibandingkan Tahun 2024 yaitu Rp33.290.000,00 dengan pertumbuhan 7,07 persen. Pada indikator Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) dengan capaian pada Tahun 2025 sebesar 0,356 menunjukkan penurunan ketimpangan jika dibandingkan Tahun sebelumnya.

2. Ringkasan Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan mencakup urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara. Adapun urusan pelayanan dasar dimaksud terdiri dari 6 (enam) urusan:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
6. Sosial.

Capaian kinerja urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar. Pencapaian kinerja urusan pelayanan dasar di Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Urusan Pendidikan

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Pendidikan yang diperoleh oleh Kabupaten Temanggung pada Tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Capaian Kinerja Outcome Urusan Pendidikan

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	91,77%	81,88%
2	Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	n.a	89,05%
3	Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	29,59%	28,15%
4	Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	n.a	43,11%
5	Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	n.a	47,18%

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja urusan pendidikan Tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan ketentuan perhitungan capaian pada Tahun 2025. Disamping itu terdapat 3 (tiga) indikator baru pada Tahun 2025 yang pada Tahun 2024 tidak terdapat indikator tersebut, yaitu indikator persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar; persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik; dan persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik.

B. Realisasi Belanja Urusan Pendidikan

Realisasi belanja urusan Pendidikan di Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebesar Rp669.928.361.084,00 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

1. Pemberian Bantuan Sosial Siswa Miskin Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Temanggung;
2. Pemberian Bantuan Sosial Siswa Miskin Sekolah Menengah Pertama yang akan melanjutkan ke jenjang lebih tinggi;

3. Pemberian Bantuan Sosial Siswa Inklusi Sekolah Dasar Kabupaten Temanggung;
4. Pemberian Hibah Kepada Satuan Pendidikan Swasta jenjang PAUD, SD dan SMP;
5. Pemberian Insentif guru pembimbing keagamaan;
6. Pemenuhan Sarana dan Prasarana pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
7. Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah.

C. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan pendidikan di Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Masih Rendahnya Sarana Prasarana Pendidikan Dalam Kondisi Baik;
3. Ketersediaan Guru Masih Kurang, terutama jenjang PAUD;
4. Sebaran Guru Kurang Merata;
5. Masih tingginya anak tidak sekolah.

2. Urusan Kesehatan

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan kesehatan yang diperoleh oleh Kabupaten Temanggung pada Tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3
Capaian Kinerja Outcome Urusan Kesehatan

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Persentase kematian ibu	n.a	0,05%
2	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	n.a	14,16%
3	Persentase pelayanan Kesehatan ibu hamil sesuai standar	100	100%
4	Persentase pelayanan ibu bersalin sesuai standar	100	100%
5	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100	100%
6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	100%
7	Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	98,49	94,90%
8	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	99,36	99,52%
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	96,69	95,41%

10	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	100	96,62%
11	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100	100%
12	Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	100	100%
13	Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	100	100%
14	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	100	100%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 3 (tiga) capaian kinerja urusan kesehatan Tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan ketentuan perhitungan capaian pada tahun 2025. Disamping itu terdapat 2 (dua) indikator baru pada Tahun 2025 yang pada Tahun 2024 tidak terdapat indikator tersebut, yaitu indikator persentase kematian ibu dan indikator Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita.

B. Realisasi Urusan Kesehatan

Realisasi belanja urusan Kesehatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Rp. 179.430.361.964,00 atau 97,18% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 184.641.190.255,00 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan realisasi sebesar Rp. 68.934.118.655,00 (97,97%) dari anggaran sebesar Rp. 70.360.215.302,00
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dengan realisasi sebesar Rp. 1.122.141.061,00 (97,58%) dari anggaran sebesar Rp. 1.149.970.500,00
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (Program Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Pemerintah Daerah dengan realisasi sebesar Rp. 172.385.490,00 (83,71%) dari anggaran sebesar Rp. 205.937.000,00
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan realisasi sebesar Rp. 261.180.000,00 (82,04) dari anggaran sebesar Rp. 318.360.000,00

C. Permasalahan yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan kesehatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. masih terjadinya kasus kematian ibu yang diakibatkan karena komplikasi kebidanan. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak dapat diprediksi meskipun ibu hamil tertangani dengan baik dari awal kehamilan;
2. Prevalensi stunting tercapai jauh lebih baik dari target yang ditetapkan karena data didasarkan pada sistem Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) sedangkan target ditetapkan berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI);
3. Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar tidak mencapai target, dan turun dari capaian Tahun 2024 karena pelayanan baru dapat dilakukan di sekolah, dan masih ada anak yang takut untuk diperiksa;
4. Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar meskipun capaian sudah naik dari Tahun 2024 tetapi belum dapat mencapai 100%. Kenaikan ini disebabkan karena adanya program pemeriksaan kesehatan gratis, tetapi tidak semua masyarakat memanfaatkan program ini karena belum menerapkan paradigma sehat yang berfokus pada pencegahan penyakit sebelum penyakit terjadi;
5. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar belum mencapai target karena tidak semua warga negara usia 60 tahun ke atas datang ke tempat pelayanan. Mereka beranggapan yang datang ke fasilitas kesehatan hanya bagi orang yang sakit;
6. Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar belum mencapai target karena pola pikir masyarakat yang belum datang ke fasilitas kesehatan jika belum merasakan sakit meskipun sudah diketahui menderita hipertensi. Selain itu, data diambil dari sistem pelaporan ASIK yang rumit dan sering *maintenance*.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diperoleh oleh Kabupaten Temanggung pada Tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4
Capaian Kinerja Outcome Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota	98,66%	48,89%
2	Persentase kemantapan jalan kabupaten/kota	88,92%	87,90%
3	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	97,68%	86,18%
4	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	2,39%	100%
5	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir	0%	100%
6	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	Kabupaten Temanggung tidak terdapat pantai	Kabupaten Temanggung tidak terdapat pantai
7	Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota	n.a	100%
8	Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah	n.a	100%
9	Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	100%	100%
10	Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota	n.a	13,24%

Sumber: DPUPR dan DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 2 (dua) capaian kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang Tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Disamping itu terdapat 1 (satu) capaian kinerja yang mengalami kenaikan disbanding tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan

terdapat perbedaan ketentuan perhitungan capaian pada Tahun 2025. Disamping itu terdapat 3 (tiga) indikator baru pada Tahun 2025 yang pada Tahun 2024 tidak terdapat indikator tersebut, yaitu indikator Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota, Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah, dan Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota.

B. Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Realisasi belanja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebesar Rp46.515.213.353,00, dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
4. Program Penataan Bangunan Gedung;
5. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
6. Program Penyelenggaraan Jalan;
7. Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
8. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Kondisi eksisting infrastruktur tingkat kerusakan lebih tinggi daripada kemampuan anggaran untuk rehabilitasi/ pemeliharannya
Permasalahan diatas dintindaklanjuti dengan memprioritaskan pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan kondisi infrastruktur kondisi baik, diantaranya dengan pemeliharaan rutin dan rehabilitasi jalan, jembatan, sistem jaringan irigasi, dan sistem penyediaan air minum;

2. Tata kelola manajemen SPAM yang belum optimal di tingkat pengelola Permasalahan diatas ditindaklanjuti dengan Pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Air Minum. Dalam upaya meningkatkan tata kelola manajemen SPAM pada tingkat pengelola, perlu dilaksanakan kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas kelembagaan air minum, baik itu dalam penentuan tarif/iuran air minum, atau dalam proses operasional dan pemeliharaan

3. Pelanggaran pemanfaatan ruang karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tata ruang.

Permasalahan diatas ditindaklanjuti dengan Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang. Karena adanya dinamika regulasi kegiatan penyelenggaraan penataan ruang, Masyarakat dituntut untuk dapat beradaptasi. Dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat perlu adanya sosialisasi penyelenggaraan penataan ruang, baik sosialisasi secara langsung maupun dengan memanfaatkan teknologi informasi

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

A. Indikator Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang diperoleh oleh Kabupaten Temanggung pada Tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.5
Capaian Kinerja Outcome Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	tidak terjadi bencana yang mengakibatkan kebutuhan pemenuhan rumah layak huni	tidak terjadi bencana yang mengakibatkan kebutuhan pemenuhan rumah layak huni
2	Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	48,81%	0%
3	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	3,7%	11,66%
4	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	100%	Kabupaten Temanggung belum ada perumahan

			untuk MBR atau perumahan subsidi yang memenuhi kriteria program dimaksud
--	--	--	--

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman Tahun 2025 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Seperti yang terdapat pada indikator Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani. Pada indikator Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani dan Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum terdapat perbedaan pada definisi operasional sehingga berdampak pada penentuan hasil perhitungan akhir.

B. Realisasi Belanja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Realisasi belanja urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman di Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebesar Rp1.070.423.948,- dengan program/ kegiatan unggulan sebagai berikut:

1. Perbaikan rumah tidak layak huni;
2. Penyediaan rumah susun sewa sederhana untuk memberikan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan perumahan dan Kawasan pemukiman di Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah;
2. Pertumbuhan penduduk yang cepat tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan dan rumah layak;
3. Keterbatasan akses terhadap pembiayaan perumahan;
4. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap standar rumah layak huni;
5. Terdapat fasilitas Rusunawa di Kabupaten Temanggung yang mengalami kerusakan atau penurunan kualitas layanan.

5. Urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat

A. Indikator Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diperoleh oleh Kabupaten Temanggung pada Tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.6
Capaian Kinerja Outcome Urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	n.a	33,33%
2	Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	n.a	100%
3	Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	38%	91,89%
4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%
5	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	53,26%

Sumber: Satpol PP dan Damkar dan BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja urusan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat Tahun 2025 mengalami fluktuasi. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan ketentuan perhitungan capaian antara Tahun 2024 dan Tahun 2025. Indikator Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan mengalami kenaikan signifikan dibanding Tahun 2024. Berbanding terbalik dengan indikator Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang mengalami penurunan. Disamping itu terdapat 2 (dua) indikator baru yaitu indikator Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku dan indikator Persentase penyelenggaraan Ketertiban

Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang pada Tahun 2025 yang pada Tahun 2024 tidak terdapat indikator tersebut.

B. Realisasi Belanja Urusan Ketentraman umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Satpol PP dan Damkar

Realisasi belanja urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebesar Rp10.438.384.244, dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan Pemerintahan daerah kabupaten/ kota dengan anggaran Rp9.165.568.153,00;
2. Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum dengan anggaran Rp659.957.041,00;
3. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran dengan anggaran Rp612.859.050,00.

2. BPBD

Realisasi belanja urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat pada BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebesar Rp 1.062.134.885,00 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

1. Program Penanggulangan Bencana dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a) Pelayanan informasi rawan bencana Kabupaten/ Kota;
 - b) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - c) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/ Kota.

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Satpol PP dan Damkar

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan;
- 2) Kurangnya SDM yang menunjang peningkatan ketentraman dan ketertiban umum;
- 3) Masih adanya pelanggaran Perda/Perbup;
- 4) Meningkatnya kejadian kebakaran di rumah/permukiman;
- 5) Jumlah pos damkar hanya terdapat 3, belum sesuai dengan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) yaitu sebanyak 6 pos;
- 6) Kurangnya Sarpras damkar dilingkungan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran;
- 7) minimnya sarpras proteksi kebakaran pada bangunan gedung milik pemerintah dan swasta yang meningkatkan potensi kebakaran;
- 8) Terbatasnya Sumber air dan belum tersedianya sumber air (groundtank) di masing - masing Pos untuk mempercepat proses pelayanan kebakaran.

2. BPBD

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat pada BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Tingginya daerah/kawasan rawan bencana di Kabupaten Temanggung;
- b. Upaya mitigasi bencana di Kabupaten Temanggung belum maksimal dikarenakan beberapa faktor;
- c. Dokumen kebencanaan belum dimiliki, seperti Dokumen Kajian risiko bencana, dokumen rencana penanggulangan bencana dan dokumen rencana kontijensi;
- d. Sarana prasarana penanggulangan bencana yang belum optimal.

6. Urusan Sosial

A. Capaian Kinerja Outcome Urusan Sosial

Capaian kinerja urusan Sosial yang diperoleh oleh Kabupaten Temanggung pada Tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.7
Capaian Kinerja Outcome Urusan Sosial

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%
4	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%
5	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	n.a	100%
6	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	n.a	100%

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja urusan sosial Tahun 2025 stabil pada capaian 100%. Terdapat 2 (dua) indikator baru pada Tahun 2025 yang pada Tahun 2024 tidak terdapat indikator tersebut. Indikator tersebut adalah persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota dan indikator persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar

B. Realisasi Belanja Urusan Sosial

Realisasi belanja urusan Sosial di Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebesar Rp28.004.005.328,-, dengan program unggulan sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Sosial
2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
3. Program Rehabilitasi Sosial

4. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
5. Program Penanganan Bencana
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan sosial di Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pemutakhiran data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang menyebabkan ketidaktepatan sasaran dalam memberikan bantuan sosial;
2. Kurang optimalnya PSKS dalam melakukan pendampingan sosial dalam penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS);

3. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Tahun Sebelumnya

a. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Kabupaten Temanggung Tahun Sebelumnya

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) adalah evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik, salah satunya adalah dengan melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) berdasarkan dari LPPD yang disusun. Tahun 2024 Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung sampai dengan Maret 2026 belum dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

b. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya.

Berdasarkan Laporan Nomor 150/XVIII.SMG/05/2025 Tentang hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2024, Kabupaten Temanggung mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota.

4. Ringkasan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Daerah

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung *Unaudited* Tahun 2025, Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 mencapai sebesar Rp2.051.319.266.447,00 dari target sebesar Rp2.094.249.204.054,00 dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 mencapai sebesar Rp1.962.247.213.381,00 dari anggaran belanja sebesar Rp2.128.782.319.282,00.

Secara rinci, rincian realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 berdasarkan jenis pendapatan dan jenis belanja dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.8
Realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 berdasarkan jenis pendapatan, dan jenis belanja

Kode Rekening	Jenis	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
4	PENDAPATAN DAERAH	2.094.249.204.054,00	2.051.319.266.447,00	97,95
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	440.934.104.015,00	451.057.543.778,00	102,30
4101	Pajak Daerah	147.148.634.896,00	139.695.644.317,00	94,94
4102	Retribusi Daerah	210.613.471.272,00	224.639.886.979,00	106,66
4103	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.016.530.223,00	24.742.792.414,00	107,50
4104	Lain-lain PAD yang Sah	60.155.467.624,00	61.979.220.068,00	103,03
42	PENDAPATAN TRANSFER	1.653.315.100.039,00	1.600.261.722.669,00	96,79
4201	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.542.401.412.317,00	1.501.354.684.035,00	97,34
4202	Pendapatan Transfer Antar Daerah	110.913.687.722,00	98.907.038.634,00	89,17
5	BELANJA DAERAH	2.128.782.319.282,00	1.962.247.213.381,00	92,18
51	BELANJA OPERASI	1.616.059.823.766,00	1.489.026.727.000,00	92,14
5101	Belanja Pegawai	982.633.463.249,00	902.874.395.619,00	91,88
5102	Belanja Barang dan Jasa	522.406.878.617,00	479.605.846.266,00	91,81
5105	Belanja Hibah	107.387.139.400,00	103.330.342.615,00	96,22

Kode Rekening	Jenis	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
5106	Belanja Bantuan Sosial	3.632.342.500,00	3.216.142.500,00	88,54
52	BELANJA MODAL	109.382.729.815,00	101.749.549.226,00	93,02
5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.450.144.646,00	58.718.617.204,00	94,02
5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.689.179.400,00	5.624.549.729,00	73,15
5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	31.148.278.000,00	29.400.525.601,00	94,39
5205	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.082.127.769,00	8.001.856.692,00	99,01
5206	Belanja Modal Aset Lainnya	13.000.000,00	4.000.000,00	30,77
53	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00	0,00	0,00
5301	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	0,00	0,00
54	BELANJA TRANSFER	402.339.765.701,00	371.470.937.155,00	92,33
5401	Belanja Bagi Hasil	14.988.600.364,00	13.659.810.224,00	91,13
5402	Belanja Bantuan Keuangan	387.351.165.337,00	357.811.126.931,00	92,37
	Total Surplus/(Defisit)	(34.533.115.228,00)	89.072.053.066,00	(257,93)
6	PEMBIAYAAN DAERAH			0,00
61	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	99.533.115.228,00	99.628.418.838,00	100,10
6101	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	99.533.115.228,00	99.533.115.228,00	100,00
6105	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	95.303.610,00	0,00
62	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	65.000.000.000,00	68.249.999.994,00	105,00
6201	Pembentukan Dana Cadangan	65.000.000.000,00	68.249.999.994,00	105,00
	Pembiayaan Netto	34.533.115.228,00	31.378.418.844,00	90,86
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0	120.450.471.910,00	

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas disampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Pajak Daerah kurang dari target sebesar Rp7.452.990.579,00 disebabkan karena tidak tercapainya target dari pajak reklame, opsen PKB dan opsen BBNKB dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Pajak reklame tidak mencapai target karena konten reklame dari

wajib pajak Gudang Garam yang berkurang sangat drastis menyebabkan realisasi pajak reklame tidak mampu mencapai target yang telah ditetapkan.

- b. Opsen pajak PKB tidak mencapai target karena tahun pertama penerapan opsen PKB dengan proyeksi penetapan target berdasarkan atas perhitungan potensi yang dilakukan oleh Bapenda Provinsi Jawa Tengah.
 - c. Opsen BBNKB tidak mencapai target karena daya beli kendaraan baru di Temanggung pada Tahun 2025 menurun sehingga opsen BBNKB tidak dapat mencapai target yang ditetapkan
2. Retribusi Daerah melebihi target sebesar Rp14.026.415.707,00 disebabkan karena melebihi target dari pos pendapatan retribusi Retribusi Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD dan Puskesmas.
 3. Hasil pengolahan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan melebihi target sebesar Rp1.726.262.191,00 disebabkan adanya tambahan setoran deviden dari Bank Jateng.
 - a. Lain-lain PAD yang Sah melebihi target sebesar Rp1.823.752.444,00 hal tersebut dikarenakan terdapat Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah yang bersumber dari Dana Cadangan untuk pembangunan Gedung Poliklinik RSUD.
 - b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat kurang dari target sebesar Rp41.046.728.282,00 dikarenakan atas pendapatan Dana Desa, DAU untuk dukungan PPPK, DAK Fisik dan DAK Non Fisik tidak tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.
 - c. Pendapatan Transfer Antar Daerah kurang dari target sebesar Rp12.006.649.088,00 di sebabkan tidak tercapainya pendapatan pajak dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sehingga mempengaruhi pendapatan bagi hasil yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung.
 - d. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp99.533.115.228,00 merupakan nilai realisasi Silpa Tahun 2024.
 - e. Realisasi Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp95.303.610,00 merupakan penerimaan pembiayaan atas dana bergulir yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Peternakan.

- f. Realisasi Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp68.249.999.994,00 merupakan Dana Cadangan yang diperuntukan untuk Pembangunan Gedung Poliklinik RSUD sebesar Rp65.000.000.000,00 dan Bunga Dana Cadangan Tahun 2025 sebesar Rp3.249.999.994,00.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran diatas terdapat Silpa sebesar Rp120.450.471.910,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.9
Rincian Silpa Tahun 2025

No	Uraian	Nilai
1	Kas di Kas Daerah	92.938.389.487,00
2	Kas BLUD RSUD	19.272.383.865,00
3	Kas BLUD Puskesmas	6.374.341.479,00
4	Kas Dana BOK Puskesmas	868.739.532,00
5	Kas BOS SD	674.467.912,00
6	Kas BOS SMP	322.149.635,00
	Jumlah	120.450.471.910,00

Berdasarkan rincian Silpa diatas terdapat Kas di Kas Daerah sebesar Rp92.938.389.487,00 dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

Tabel 1.10
Rincian Kas di Kas Daerah

No	Uraian	Nilai
1	DAK Non Fisik	2.802.724.104,00
2	DAK Fisik	8.854.421,00
3	TPG/ THR Guru	31.684.906.500,00
4	DBHCHT	2.893.545.999,00
5	Insentif Fiskal	452.340.114,00
6	DAU <i>Earmark</i>	2.219.436.688,00
7	Sisa lain-lain	52.876.581.661,00
	Jumlah	92.938.389.487,00

5. Inovasi Daerah

Inovasi pelayanan publik dikatakan sebagai inisiatif terobosan dari instansi/lembaga publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan

publik. Inisiatif terobosan tersebut terletak pada kebaruan (*novelty*). Prinsip kebaruan tersebut dibedakan dengan inovasi dalam teknologi yang merupakan keunikan yang khas berbeda dengan yang lain.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Kabupaten Temanggung selama Tahun 2025 telah melakukan berbagai inovasi dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Inovasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung telah berhasil memperoleh 2 (dua) penghargaan dari Menteri Dalam Negeri berupa *Innovative Government Award (IGA)* Tahun 2025 (kategori Kabupaten Terinovatif dan Pemda Tercepat Melaporkan Inovasi Daerah) yang dibuktikan dengan capaian indikator kinerja “Indeks Inovasi Daerah” dengan skor 88,88 (kategori sangat inovatif).



Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 1,1
Innovative Government Award (IGA) Tahun 2025

Selain itu, Kabupaten Temanggung meraih penghargaan IDEA Jateng 2025 (2 inovasi) serta salah satu dari 5 Pemenang Utama KRENOVA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.



Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 1.2
Penghargaan IDEA Jateng 2025



Sumber: Bapperida Kabupaten Temanggung, 2025

Gambar 3

Penghargaan KRENOVA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Pada Tahun 2024-2025, Kabupaten Temanggung memiliki inovasi daerah sebanyak 249 inovasi yang berasal dari unsur Perangkat Daerah, ASN, serta masyarakat sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Bupati Temanggung, dan 10 (sepuluh) inovasi daerah tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.11
Nama-Nama 10 (sepuluh) Daftar Inovasi Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2025

NO	PELAKSANA INOVASI DAERAH	INOVASI DAERAH	KETERANGAN
1.	Bapperida	BUMI MUTIARA (Bersatu Membangun Ekonomi, Masyarakat Unggul, Petani Sejahtera dan Berkelanjutan)	Optimalisasi hulu-hilir produk kopi, domba dan seni jaran kepeng yang bertujuan untuk ketersediaan bibit dan peningkatan produktivitas pertanian, meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, peningkatan sumber daya manusia, dan meningkatkan kualitas dan popularitas kesenian jaran kepeng.
2.	DPMPTSP	Gerakan Pendampingan Layanan Perizinan (Gampil)	Percepatan layanan perizinan untuk mendorong masuknya investor di Kabupaten Temanggung melalui pendampingan layanan perizinan yang responsif, komprehensif dan kolaboratif, sehingga pelaku usaha memperoleh kepastian dalam perizinan usaha.
3.	DPMPTSP	Peningkatan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui "Jempol Boss" di DPMPTSP Kabupaten Temanggung	<i>Online Single Submission</i> (OSS) merupakan bentuk inovasi pelayanan publik di bidang perizinan dengan mengadopsi teknologi informasi di bidang pelayanan perizinan. Pelayanan OSS tersebut bertujuan agar mekanisme perizinan yang diselenggarakan oleh pemerintah dapat dilakukan secara efektif, efisien dan untuk menghindari terjadinya praktek korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintah
4.	Dindukcapil	Curhat Pak (Curhatan Hati Permasalahan Administrasi Kependudukan)	Curhat PAK adalah cerminan dari Profesionalisme Pegawai dalam menjalankan tugas, Responsif dalam memberikan

NO	PELAKSANA INOVASI DAERAH	INOVASI DAERAH	KETERANGAN
			informasi dan menjawab kebutuhan Masyarakat akan permasalahan kependudukan, Inovatif memanfaatkan teknologi dan media sosial yang menjadi media komunikasi modern untuk mendapatkan informasi, membangkitkan jiwa Melayani dan menjaga akuntabilitas dalam transparansi, pertanggungjawaban dan integritas pelayanan
5.	Dinkominfo	SIDEDI (Sistem Informasi Desa Digital)	SIDEDI merupakan sistem informasi berbasis aplikasi website yang ditujukan untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat serta menjadi penyimpanan dan penyebarluasan data sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan. Sistem tersebut dapat diakses oleh siapapun melalui web browser seperti Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge dengan jaringan internet dan perangkat keras ponsel ataupun komputer dengan akses sesuai jenis pengguna. Dalam hal penyimpanan dan penyebarluasan data, pemerintah dapat melakukan imputasi berupa data warga, informasi kegiatan, kelembagaan baik berupa data statistik, geospasial dan keuangan melalui halaman backend yang kemudian data bersifat rekapitulasi atau umum dapat dipublikasikan kepada masyarakat melalui halaman frontend.

NO	PELAKSANA INOVASI DAERAH	INOVASI DAERAH	KETERANGAN
			Masyarakat dan pemerintah dapat melakukan analisis melalui informasi yang telah dipublikasikan seperti data statistik dan analisis kewilayahan terhadap potensi masyarakat melalui visualisasi yang menarik seperti grafik dan peta.
6.	Kecamatan Pringsurat	Pringsurat Ngangeni	Pringsurat Ngangeni mempunyai tujuan untuk mengembangkan potensi Kecamatan Pringsurat, meningkatkan ekonomi masyarakat dan membranding Kecamatan Pringsurat agar semakin dikenal dan terkenal
7.	ASN RSUD Kabupaten Temanggung	Si Tangkas “Strategi Intervensi Turunkan Angka Stunting”	Instalasi Gizi bekerjasama dengan programmer RSUD Kabupaten Temanggung berinisiatif untuk mengambil peran dalam penanganan masalah stunting melalui gagasan inovasi baru berupa aplikasi SI TANGKAS “Strategi Intervensi Turunkan Angka Stunting” yang merupakan aplikasi deteksi dini dan manajemen penanggulangan baduta risiko stunting di wilayah Kabupaten Temanggung sebagai upaya preventif dan promotif berbasis IoT (Internet of Things).
8.	ASN DPMPTSP	Siap Tanam Menuju 2,2 Triliun (Aksi Andalan Pendampingan Penanaman Modal)	SIAP TANAM tidak hanya memiliki legitimasi formal, tetapi juga menjamin keberlanjutan, kepastian hukum serta selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat maupun daerah. SIAP TANAM berupa pendampingan tatap muka dan jemput bola, sosialisasi

NO	PELAKSANA INOVASI DAERAH	INOVASI DAERAH	KETERANGAN
			dan edukasi, bimtek, fasilitasi perizinan dan insentif, monitoring dan evaluasi, dan fasilitasi penyelesaian masalah.
9.	Masyarakat	Mesin Roasting berbasis Android	Mesin Roasting berbasis android (MRBA) lebih efisien bahan bakar, daya listrik, dan lebih detail untuk proses sangrai biji kopi, dikarenakan mesin ini sudah dilengkapi fitur-fitur modern yang membantu untuk memonitoring proses roasting, dan juga merecord hasil roasting. mesin ini juga dilengkapi dengan sistem otomatis, sehingga mempermudah pemakaiannya. dan dilengkapi dengan safety yang bagus. Produk ini dapat meredam asap pemanasan dari hasil roasting, dan juga memisahkan kotoran/kulit ari kopi dari biji kopi dengan baik dan sempurna.
10.	Masyarakat	Batakingdom Bata Tempel/Hias yang Terbuat dari Tanah Liat	Memproduksi BATAKINGDOM (Bata tempel) menjadi alternatif karena mempunyai kelebihan yang unik dan menawarkan produk tradisional bernuansa modern dan elegan, di antaranya memberikan kesan mewah dan artistik pada bangunan, serta tersedia dalam berbagai model yang dapat disesuaikan dengan selera. Selain itu, bata tempel juga cenderung lebih ringan dari bata biasa, dan pemasangannya relatif mudah, mirip dengan pemasangan keramik. Bata tempel memberikan tampilan

NO	PELAKSANA INOVASI DAERAH	INOVASI DAERAH	KETERANGAN
			yang menarik dan unik pada dinding, baik interior maupun eksterior. Kesan klasik, natural, atau bahkan mewah dapat diciptakan tergantung pada jenis dan cara pemasangannya.

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025 yang dapat kami sajikan. Selanjutnya, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Temanggung sehingga dapat berjalan secara baik dan kondusif.

Semoga penyampaian Ringkasan LPPD ini dapat bermanfaat dan dijadikan dasar untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan mampu menjadi pemacu peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Temanggung tahun berikutnya. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi setiap langkah kita dalam mewujudkan Temanggung yang lebih Sejahtera.

Aamiin ya robbal 'Aalamiin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Temanggung, 27 Maret 2026

Bupati Temanggung,



Agus Setyawan, S.E.